

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN BUDAYA LOKAL PADA PERGURUAN TINGGI

Waway Qodratullah S*)
Surel: waway@polban.ac.id

ABSTRACT

This paper discusses the idea of the multicultural education development strategy based on the local wisdom at higher education. Indonesia, as the largest archipelago in the world, certainly has diverse cultural base. The fact that ethnic and cultural plurality is not only justified historically, sociologically, and anthropologically, but also theologically. An important thing in the sustainability of the multicultural education is the loss of fanaticism and exclusivism tendencies. Therefore, the management of the proper local culture should become the core in the development of national education. The matter becomes the basis that the multicultural education suits to be the basis of the character education in higher education. Nevertheless, multicultural education does not mean eliminating the primordial identity because it will cause the social and cultural backwards. The Indonesian culture might not be narrowed down into particular ethnic and religion for such actions would not produce the original identity. Even worse, it will disappear the original identity. The development of the multicultural education based on the local culture is carried through some steps: Identifying and constructing the data base of local culture; Inserting the values of local wisdom into the core curriculum of higher education through the content of the Character Education Course; Using the contextual-holistic approach; Providing facilities and infrastructure in accommodating the form of local culture; Exploring the values of local wisdom in classrooms; Building and promoting the foundation of the character educators; and Evaluating the achievement of learning outcomes

Kata Kunci: Pendidikan, Multikultur, Kearifan Lokal, Pendidikan Tinggi

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tentunya mempunyai akar budaya yang etnik yang beragam dan sangat kaya. Beragamnya budaya di Indonesia tentu saja akan menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi beragamnya budaya menjadi kebanggaan nasional, namun disisi lain apabila ragam budaya ini tidak dikelola dengan baik, akan menjadi

penyebab utama perpecahan dan pertikaian di kalangan masyarakat.

Karenanya, pengelolaan budaya daerah yang baik seharusnya menjadi *core* dalam pembangunan pendidikan nasional. Dengan kata lain, apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia harus mengedepankan berbagai macam aspek kehidupan manusia, termasuk disini budaya local sebagai akar dan

*) Waway Qodratullah S, S.Pd., M.Ag : Dosen Politeknik Negeri Bandung

asal kehidupan manusia. Pendidikan tentu saja bukan hanya sarana *transfer of knowledge*, melainkan juga masuk sebagai *transfer of culture* dan *transfer of value*.

Pandangan multikultur dalam praktik kenegaraan Indonesia belum dijalani sebagaimana mestinya. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai slogan yang diagung-agungkan *founding father* dan menjadi ruh perjalanan kebangsaan Indonesia ternyata hanya menekankan pada aspek kesatuan dan cenderung mengabaikan keragaman budaya dan masyarakat Indonesia.

Pendidikan yang menjadikan multi budaya sebagai basisnya, bukan saja dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara individual, melainkan juga berimplikasi pada kehidupan manusia secara social dan cultural. Hal ini karena pendidikan multi budaya, sebagaimana diisyaratkan oleh Blum (2001 : 16) sarat dengan penghargaan, penghormatan, dan kebersamaan dalam suatu komunitas yang majemuk.

Dalam kontek pendidikan di perguruan tinggi, penulis menilai saat

ini dihadapkan pada dua tantangan, yaitu tantangan eksternal dan internal. Tantangan eksternal yang sifatnya tantangan dari luar berupa arus globalisasi yang begitu deras. Perubahan yang terjadi di masyarakat karena kemajuan iptek yang begitu cepat. Dalam situasi ini, pertukaran informasi, budaya, pola hidup antar bangsa terjadi secara alamiah dan tidak dapat terelakan lagi. Pada gilirannya akan terjadi berbagai macam pegeseran nilai dalam kehidupan manusia. Sedangkan tantangan internal lebih berasal kepada tantangan dan hambatan yang datangnya dari dalam system pendidikan itu sendiri, meliputi perbedaan pandangan mengenai pendidikan berbasis budaya, ketidakjelasan landasan filosofis, dan ketidak jelasan konsep pendidikan berbasis budaya.

Dalam hal kurikulum di perguruan tinggi, berdasarkan kepmendiknas no 232 tahun 2006, ditetapkan bahwa bahwa kurikulum inti di perguruan tinggi dikelompokkan kedalam 5 kelompok yakni, Matakuliah Pengembangan

Kepribadian (MPK), Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), dan Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB). Melihat pengelompokan mata kuliah di atas, maka pendidikan multicultural berbasis kearifan budaya local dalam kurikulum di perguruan tinggi sejatinya menjadi bagian dari pendidikan karakter yang sebagaimana diamanatkan dalam UU Pendidikan Tinggi No 12 tahun 2012 dan PP No 44 tahun 2015 meliputi mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, dan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis mencoba melakukan kajian pengembangan pendidikan multicultural berbasis kearifan budaya local pada perguruan tinggi. Makalah ini membahas masalah pada kajian kebijakan pendidikan multicultural berbasis kearifan budaya local dalam aspek kurikulum dan proses pembelajaran. Adapun perumusan masalah dalam makalah

ini meliputi makna pendidikan multicultural, makna kearifan budaya local dan pengembangan kebijakan pendidikan multikultur berbasis kearifan budaya local di perguruan tinggi.

PEMBAHASAN

1. Pendidikan Multikultural

Akar pendidikan multikultural, apabila ditelaah dari asal-usulnya telah dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap adanya kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap *melting pot* yang sudah berjalan cukup lama tentang kultur dominan Amerika khususnya New York dan California (Bank, 1984: 3; Sobol, 1990: 18; Supardan, 2007: 1033). Pada gilirannya, istilah multi budaya tersebut selalu melekat dengan pendidikan, yang mempunyai arti secara luas meliputi *any set of process by which schools work with rather than against oppressed groups* (Sleeter, 1992: 141; Supardan, 2007: 1033)

Secara bahasa, pendidikan multikultural terdiri dari dua term, yaitu pendidikan dan multikultural.

Pendidikan berarti proses pengembangan sikap dan tata laku peserta didik melalui pengajaran, pelatihan, dan pembinaan. Sedangkan multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan.

Tilaar (2003: 167) menjelaskan bahwa Pendidikan multikultural merupakan suatu wacana yang lintas batas, karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial (*social justice*), demokrasi dan hak asasi manusia. Azyumardi Azra sebagaimana dikutip Mashadi (2009: 48) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau secara keseluruhan.

Prudence Crandall, sebagaimana dikutip Hasyim Dardi, mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik baik dari aspek keragaman suku (etnis), ras, agama

(aliran kepercayaan) dan budaya (kultur). Secara lebih singkat Andersen dan Custer (1994) mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman budaya.

Stavenhagen (1986) sebagaimana dikutip Supardan (2007) menyebutkan bahwa konsep multikultur mempunyai dua pengertian. Konsep *pertama* bahwa ia merupakan realitas social dalam masyarakat yang heterogen, dan konsep *kedua* bahwa dalam masyarakat majemuk telah diangkat suatu keyakinan, ideologi, sikap, maupun kebijakan yang menghargai pluralisme etnik dan budayanya sebagai sesuatu yang berharga, potensial, yang harus dipelihara dan ditumbuhkembangkan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis mengambil sebuah kesimpulan pendidikan multikultural sebagai proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.

Suhardan (2007: 1035) menyebutkan bahwa kata kunci dalam pendidikan multicultural tersebut adalah pengakuan akan adanya perbedaan dan penghargaan. Sehingga dalam pendekatannya harus berlandaskan kesadaran untuk menghargai dan menghormati serta mampu bernegosiasi terhadap rumusan-rumusan relitas yang ada.

2. Kearifan Lokal

Istilah Kearifan Lokal apabila dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 term yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dalam hal ini, local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah local genius. Local genius ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales (Nurhandayani, 2011).

Dalam perjalanannya, para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian local genius ini. Haryati Soebadio sebagaimana dikutip Ayatrohaedi, 1986: 18-19) mengatakan bahwa local genius adalah identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Sementara Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986:40-41) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang.

I Ketut Gobyah (2003) dalam tulisannya “Berpijak pada Kearifan Lokal”, mengatakan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa

lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meski pun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama. Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (reinforcement). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus.

Pergerakan secara alamiah tersebut terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Adat yang tidak baik terjadi dikarenakan terjadinya pemaksaan oleh penguasa. Bila demikian hal yang terjadi, maka ia tidak tumbuh secara alamiah tetapi dipaksakan. Dan pada gilirannya kebiasaan tersebut tergerus dan hilang dengan sendirinya.

Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (local culture). Budaya lokal (juga sering disebut budaya daerah) merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya nasional (Indonesia) dan budaya global.

Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.

Dari definisi-definisi itu, kita dapat memahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan secara sukarela oleh

para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi.

Beberapa bentuk pengetahuan tradisional itu muncul lewat cerita-cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, ritual-ritual, dan juga aturan atau hukum setempat. Kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima secara sukarela dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka tanpa paksaan dari pihak manapun.

Berangkat dari definisi diatas, penulis mencoba memformulasikan kearifan budaya local dengan bengan bahasa yang sederhana, bahwa kearifan local yang dibangun dalam konteks kebudayaan masyarakat Indonesia selalu berlandaskan pada dua pilar yaitu kebiasaan adat istiadat dan juga kepercayaan/ agama. Adat istiadat lahir dari pemikiran, sementara agama adalah kepercayaan dan keyakinan yang berasal dari

wahyu Tuhan. Kedua hal ini saling menguatkan dan diwariskan secara turun temurun dan terlembaga dalam norma yang menjaga hidup dan kehidupan masyarakat tersebut.

3. Pengembangan Pendidikan Multikultural berbasis kearifan budaya lokal di Perguruan Tinggi

Pendidikan multikultur sebagai praktik social dan kebijakan pemerintah, dewasa ini telah diterima di banyak negara sebagai sesuatu yang penting. Proses untuk menuju pengakuan tersebut tentu saja melalui jalan yang terjal dan berliku. Demokrasi social secara politis berkomitmen memberikan dan melindungi seluruh hak asasi manusia. Perdana Menteri Trudeau merupakan tokoh politik humanis yang memiliki jangkauan jauh ke depan untuk kalangan elit politik internasional. Ia dengan secara tegas mengeluarkan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan fundamental, hak-hak demokrasi, hak bermukim dan bekerja, hak-hak hukum, pemakaian

bahasa resmi Inggris dan Perancis, termasuk hak-hak pendidikan yang digunakan kaum *visible minorities* Kanada (Supardan, 2007: 1061-1062)

Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan dan terpisah oleh lautan, diapit oleh dua benua dan dua samudera. Implikasi dari kondisi alam ini menyebabkan Indonesia mempunyai aneka ragam budaya dan corak kebudayaan yang plural. Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip Supardan (2007) menyebutkan bahwa bangsa ini mempunyai lebih dari 13.000 pulau besar dan kecil, serta berbicara dalam ratusan bahasa daerah. Pluralisme multi dimensional ini bukan hanya membentuk mozaik ke-Indonesia-an yang sangat indah dan mempesona, tetapi sekaligus rawan terhadap konflik.

Namun begitu, pluralisme yang berkembang sebenarnya bukan hak eksklusif yang hanya dimiliki Indonesia. Amerika contohnya, dikenal pula sebagai Negara yang mempunyai pluralism etnis, sehingga Amerika mempunyai jargon "*E Pluribus Unum*". Kemudian Kanada

yang mempunyai kebijakan Multikultural dengan jargonnya "*Unity in Diversity*" sebuah semboyan yang hampir mirip dengan Bhineka Tunggal Ika (Supardan, 2002: 34).

Apabila dibandingkan dengan konsep multicultural Indonesia dengan negara-negara lainnya, dapat kita temukan sesuatu yang khas dan unik pada konsep multicultural di Indonesia. Pada negara-negara barat, multicultural yang terjadi berkembang seiring kedatangan kaum *migrant*, sehingga multicultural yang terjadi dipengaruhi dari luar dan bersifat budaya antar bangsa. Sementara di Indonesia, multicultural yang terjadi dibangun oleh budaya etnis daerah yang kemudian diikat menjadi satu, sehingga bersifat local dan berasal dari dalam.

Dalam konteks pendidikan multicultural, Supardan (2007: 1040) menjelaskan bahwa ia adalah sebuah kemestian dalam penyusunan kebijakan social politik. Fakta pluralitas etnik dan budaya tidak saja dibenarkan secara historis, sosiologis, antropologis, melainkan juga secara

teologis. Catatan penting dalam keberlangsungan pendidikan multikultural tersebut adalah hilangnya fanatisme kelompok dan kecenderungan eksklusifisme. Hal ini menjadi penting mengingat fanatisme sempit dan eksklusifitas selama ini menjadi penyebab potensial dan utama dalam konflik yang selama ini terjadi.

Namun begitu, pendidikan multicultural juga bukan berarti menghilangkan perbedaan sama sekali. Menghilangkan identitas primordial hanya akan menyebabkan kematian secara social dan budaya (Magnis Soeseno, 2000: 30). Indonesia tidak mungkin disusutkan identitas budayanya hanya menjadi Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Islam, Kristen ataupun Budha dan lainnya. Sebab tindakan tersebut tidak akan menghasilkan identitas sebenarnya, malah semakin menghilangkan kesejatan identitasnya.

Kemajemukan etnis dan budaya Indonesia sebenarnya dinilai baik dan positif baik secara historis maupun ideologis. Sejak zaman kerajaan, Nusantara telah memiliki hubungan

politik yang baik dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara semisal Champa, Syam, Burma. Pujangga Mpu Tantular bahkan melukiskan kehidupan yang harmoni dalam Kitabnya *Sutasoma* dengan kalimat “*Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrua*” yang berarti “walaupun berbeda, satu adanya, tidak ada agama yang tujuannya berbeda” (Darmodiharjo, 1985: 17). Adapun secara antropologis, bangsa Indonesia kaya akan keragaman etnis, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat yang semuanya tergantung dari *local genius* dan bersifat primordial (Sumardjo, 2002: 23 dalam Supardan, 2007)

Secara yuridis, paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu *concern* dari Pasal 4 UU N0. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Pada konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan intoleransi. Dalam prakteknya, Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik. Sehingga pemasukan bahan ajar yang berisi ide dari berbagai kelompok budaya menjadi sebuah keharusan. Pendidikan memang mengajarkan nilai-nilai budayanya sendiri namun selain itu juga perpektif dan budaya orang lain diwilayah orang lain diseluruh dunia. Hal ini dapat membuat peserta didik “melek budaya” (cultural literacy) yang mampu melihat berbagai sudut

pandang budaya yang pernah hidup diberbagai belahan dunia.

Banks (1984) telah mendiskripsikan evolusi pendidikan multikultur dalam empat fase. *Pertama*, ada upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap kurikulum. *Kedua*, hal ini diikuti oleh pendidikan multietnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. *Ketiga*, kelompok-kelompok marginal yang lain, seperti perempuan, orang miskin, orang cacat, mulai menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. *Keempat* perkembangan teori, riset dan praktek, perhatian pada hubungan antar-ras, kelamin, dan kelas telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritis, jika bukan para praktisi, dari pendidikan multikultur. Gerakan reformasi mengupayakan transformasi proses pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkatan sehingga semua murid, apapun ras atau etnis, kecacatan, jenis kelamin, dan kelas

sosial akan menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan.

Karenanya, dalam upaya pengembangan pendidikan multicultural, maka basis kearifan local tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kebudayaan daerah sebagai pondasi dari kebudayaan nasional, seharusnya mengakar kuat dan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan karakter yang selama ini didengungkan sebagai upaya membangun karakter dan kepribadian bangsa.

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam mengembangkan pendidikan multicultural berbasis kearifan budaya local, yaitu :

- a. Melakukan identifikasi dan data base kebudayaan daerah,
- b. Memasukan nilai-nilai kearifan local kedalam kurikulum inti perguruan tinggi melalui muatan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Mata kuliah Kewarganegaraan,

Pendidikan Bahasa Indonesia, Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) dan Pendidikan Agama sejatinya menjadi patokan dalam menanamkan nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan, dan toleransi dalam perbedaan.

- c. Pendekatan yang dilakukan oleh pendidik dalam menanamkan nilai-nilai multikultural ada baiknya bersifat holistik-kontekstual.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana dalam mewadahi bentuk kebudayaan lokal yang berkembang dalam kehidupan peserta didik,
- e. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dalam mengeksplor nilai-nilai kearifan local dalam pembelajaran di kelas.
- f. Pembinaan dan peningkatan kualitas, menyusun pola peningkatan kualitas pendidik dengan kearifan local sebagai pondasi karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik.

g. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian hasil, yang bisa dilakukan dengan cara, 1) menyusun daftar prioritas, 2) menyusun instrument evaluasi, dan 3) menentukan kriteria keberhasilan.

Selanjutnya, ada lima dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu pendidik dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar (siswa) sebagaimana diungkapkan oleh Banks (1977), yaitu:

a. Dimensi integrasi isi/materi (*content integration*).

Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan ‘poin kunci’ pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Salah satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru bekerja ke dalam kurikulum mereka

dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak dirubah. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural.

b. Dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*).

Suatu dimensi dimana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri;

c. Dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*).

Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan

memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus.

Pelajar yang datang ke sekolah dengan banyak stereotipe, cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan kesalahpahaman terhadap kelompok etnik dan ras dari luar kelompoknya. Penggunaan teksbook multikultural atau bahan pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif dapat membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi terhadap ras yang lebih positif. Jenis strategi dan bahan dapat menghasilkan pilihan para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras luar, etnik dan kelompok budaya lain.

d. Dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*).

Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperative learning*), dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*). Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar.

e. Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*).

Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staff dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah.

SIMPULAN

Dari pembahasan terhadap masalah yang penulis kaji di atas, maka dapat ditarik seimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.
2. Kearifan lokal adalah pengetahuan yang

dikembangkan secara sukarela oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi.

3. Pengembangan pendidikan multikultural berbasis kearifan budaya local diperguruan tinggi dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu:
 - a. Melakukan identifikasi dan data base kebudayaan daerah,
 - b. Memasukan nilai-nilai kearifan lokal kedalam kurikulum inti perguruan tinggi melalui muatan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Mata kuliah Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Indonesia, Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) dan Pendidikan Agama sejatinya menjadi *core*

- dalam menanamkan nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan, dan toleransi dalam perbedaan.
- c. Pendekatan yang dilakukan oleh pendidik dalam menanamkan nilai-nilai multicultural berbasis kearifan budaya local ada baiknya melakukan pembelajaran melalui pendekatan holistik-kontekstual.
- d. Menyediakan sarana dan prasarana dalam mewadahi bentuk kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan peserta didik,
- e. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dalam mengeksplor nilai-nilai kearifan local dalam pembelajaran di kelas.
- f. Pembinaan dan peningkatan kualitas, menyusun pola peningkatan kualitas pendidik dengan kearifan local sebagai pondasi karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik.
- g. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian hasil, yang bisa dilakukan dengan cara, 1) menyusun daftar prioritas, 2) menyusun instrument evaluasi, dan 3) menentukan criteria keberhasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Blum, A. Lawrence, (2001) *Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural*, Dalam Larry May, dan Shari Colins-Chobanian, *Etika Terapan : Sebuah Pendekatan Multikultural*, Terjemahan : Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Banks, James, (1977) *Teaching Strategies for The Social Studies : Enquiry, Valuing, and Decision Making*,

- Philippines: Adisson-Wesley.
- Banks, James, (1984) *Teaching Strategies for Ethnic Studies*, Newton: Allyn and Bacon.
- Cottins, William. (1983) *Webster's New School and Dictionary*. United States of America: Ward Publising Co.Inc.
- Darmodihardjo, D., (1985) *Pancasila dalam Beberapa Perspektif*, Jakarta: Aries Lima
- Hasyim, Dardi. (tt). *Pendidikan Multikultural di Sekolah*. Surakarta : UPT penerbitan dan percetakan UNS.
- Mashadi, Imron. (2009) *Pendidikan Agama Islam Dalam Persepektif Multikulturalisme*. Jakarta : Balai Litbang Agama.
- Magnis-Soeseno, F., (2000) *Kuasa dan Moral*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ruslan, Ibrahim (2008). *Pendidikan Multikultural : Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama*. Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi. No. 1. Vol 1. Hal 116
- Stavenhagen, R., (1986). *Problems and Prospects of Multiethnic States*, Tokyo : United Nation University Press.
- Supardan, D., (2002) *Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendekatan Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, nasional, dan Global dalam Integrasi Bangsa*, Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung: Tidak dipublikasikan.
- Supardan, D., (2002) *Keberhasilan Kebijakan Multikulturalisme Kanada dan Tantangannya : Studi Hak Azasi Manusia dalam Perspektif Global*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial (JPIS), Bandung : FPIPS UPI.
- Supardan, D., (2007) *Pendidikan Multibudaya*, dalam Ali, M., Ibrahim, R., Sukmadinata, N.S., Sudjana, D., dan Rasjidin, W (Penyunting). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung : Pedagogiana Press (halaman 1033-1076)
- Supriadi, Dedi, (2001) *Konseling Lintas Budaya : Isu-isu dan Relevansinya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bimbingan dan Konseling UPI, Bandung.
- Tilaar. (1999) *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation.
- Tilaar. (2003) *Kekuasaan Dan Pendidikan : Suatu Tinjauan Dan Persepektif Studi Kultural*. IndonesiaTera.

Towaf , Siti Malikhah, (1999)
*Pendekatan Holistik –
Kontekstual Bagi Pendidikan
Agama Islam di Perguruan
Tinggi Umum. Dalam*
Nurcholis, Madjid,
(Penyunting). *Dinamika
Pemikiran Islam di Perguruan
Tinggi, Wacana Tentang
Pendidikan Islam. Jakarta:*
Logos Wacana Ilmu.

Sumber Internet

[http://www.balipost.co.id/BALIPOST
CETAK/2003/9/17/bd3.htm](http://www.balipost.co.id/BALIPOST
CETAK/2003/9/17/bd3.htm)

[http://naninorhandayani.blogspot.com
/2011/05/pengertian-kearifan-
lokal.html](http://naninorhandayani.blogspot.com
/2011/05/pengertian-kearifan-
lokal.html)

[http://staff.undip.ac.id/sastra/dhanang
/2010/11/22/membangun-
masyarakat-madani-berbasis-
kearifan-lokal-di-kabupaten-
brebes/](http://staff.undip.ac.id/sastra/dhanang
/2010/11/22/membangun-
masyarakat-madani-berbasis-
kearifan-lokal-di-kabupaten-
brebes/)

[http://tal4mbur4ng.blogspot.com/201
0/07/kearifan-lokal-guna-
pemecahan-masalah.html](http://tal4mbur4ng.blogspot.com/201
0/07/kearifan-lokal-guna-
pemecahan-masalah.html)

[http://rivarizalfilosuf.blogspot.com/20
12/05/pendidikan-
multikultural.html](http://rivarizalfilosuf.blogspot.com/20
12/05/pendidikan-
multikultural.html)